

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anggara *et.al.*, 2014, *Naskah Akademik dan Rencana Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan*, ICJR, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Semarang.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan RM Surachman, 2015, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, Solly, 1989, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Loqman, Loebby, 1990, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. D., Mahfud, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Muhammad, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Syaukani, Imam dan A. Ahsan Thohari, 2005, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tanusubroto, S., 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*,

Alumni, Bandung.

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Keputusan Ketua MA Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 2013.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 686).

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana (Registrasi Setum Polri Nomor 4 Tahun 2014).

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2012 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2012 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

C. Penelitian

Hamida Alfathi Syifauna, 2017, *Politik Hukum Terkait Praperadilan Dalam Hal Pengajuan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka*, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rizka Fakhry A, 2015, *Implikasi lemahnya pengaturan perihal praperadilan dalam kuhap terhadap pelaksanaan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka*, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wahyu Fitria, 2017, *Urgensi pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana militer*, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Artikel Jurnal

Fachrizal Afandi, 2016, *Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28, Nomor 1, Februari 2016.

Jan S. Maringka, 2015, *Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Jurnal Peradilan Indonesia, Vol. 3, Juli-Desember 2015.

Luhut M. P. Pangaribuan, 2014, *Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Teropong, Vol. 1, Agustus 2014.

Miko Ginting, 2015, *Evaluasi Terhadap Pembaharuan KUHAP*, Jurnal Peradilan Indonesia, Vol. 3, Juli-Desember 2015.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 atas nama Pemohon Tjetje Iskandar, tanggal 1 Mei 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah, tanggal 28 April 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2015 atas nama Pemohon Drs. Rusli Sibua. M. Si., tanggal 9 November 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/PRAPER/2016/PN.Sby atas nama Pemohon Diar Kusuma Putra. S.E., tanggal 7 Naret 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.Sby atas nama Pemohon Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti, tanggal 12 April 2016.

F. Sumber Internet

Hukum Online, “Penelitian KHN: Praperadilan Mengandung Banyak Kelemahan”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b29bab9ef3a7/penelitian-khn-%20praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan>, diakses pada 26 Maret 2019 Pukul 14.43 WIB.

Hukum Online, “Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan bagi DPO”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac37b900a301/pro-dan-kontra-sema-larangan-pengajuan-praperadilan-bagi-dpo>, diakses pada 26 Maret 2019 Pukul 14.43 WIB.

I Gede Yuliartha, “Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia”,
<https://media.neliti.com/media/publications/109939-ID-lembaga-praperadilan-dalam-perspektif-ki.pdf>, diakses pada 26 Maret 2019 Pukul 14.43 WIB.

ICJR, “Minim Pengaturan, Praperadilan Hasilkan Putusan Janggal dan Tidak Menjamin Kepastian Hukum”,
<http://icjr.or.id/minim-pengaturan-praperadilan-hasilkan-putusan-janggal-dan-tidak-menjamin-kepastian-hukum/>, diakses pada 26 Maret 2019 Pukul 14.43 WIB.

ICJR, “Problematika Lembaga Praperadilan dalam Praktek”,
<http://icjr.or.id/problematika-lembaga-praperadilan-dalam-praktek/>, diakses pada 26 Maret 2019 Pukul 14.43 WIB.

Rois Jajeli, “Kronologi La Nyalla Terbang ke Malaysia, Masuk ke Singapura, lalu

Dideportasi”, <https://news.detik.com/berita/d-3222278/kronologi-la-nyalla-terbang-ke-malaysia-masuk-ke-singapura-lalu-dideportasi>, diakses pada 26 Maret 2019 Pukul 14.43 WIB.